

BAB II

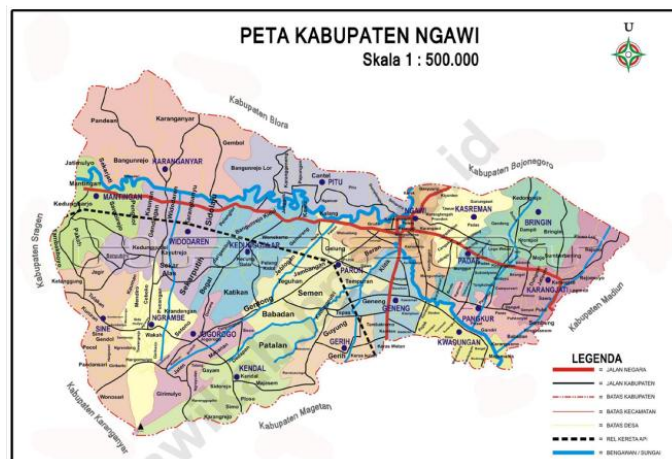
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat provinsi. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, sehingga memiliki akses strategis sebagai penghubung dua provinsi besar di Pulau Jawa.

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Ngawi

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Ngawi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi, 2023

Terletak di bagian barat Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki luas wilayah sebesar 1.394,74 km². Berdasarkan geografisnya, secara astronomis kabupaten ini berada pada titik koordinat 110°11'–111°40' Bujur

Timur dan 7°21' – 7°31' Lintang Selatan (BPS, Kabupaten Ngawi tahun 2023). Topografi wilayah Kabupaten Ngawi berupa dataran tinggi dan tanah datar. dengan ketinggian rata-rata 50-600 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu di bagian utara dan barat sementara di sisi timur dan Selatan berbatasan dengan kabupaten-kabupaten di Jawa Timur.

Berikut merupakan batas wilayah dari Kabupaten Ngawi :

- a) Batas Utara: Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro;
- b) Batas Timur: Kabupaten Madiun;
- c) Batas Selatan: Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan; dan
- d) Batas Barat: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah).

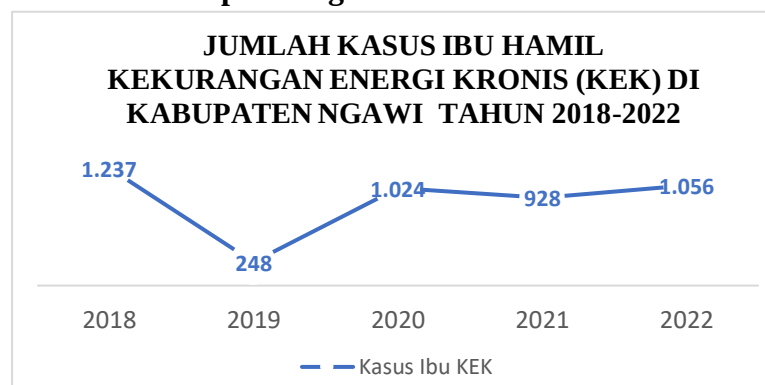
2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Ngawi

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim Kabupaten Ngawi 2020-2023, tahun 2022 berada pada angka 877.432 jiwa yang terdiri atas 435.470 jiwa penduduk laki-laki dan 441.962 jiwa penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan hasil penghitungan jumlah penduduk pada tahun 2010 (SP2010), penduduk Kabupaten Ngawi telah mengalami pertumbuhan laju penduduk dengan nilai sebesar 0,60 persen. Di sisi lain, terdapat angka rasio jenis kelamin tahun 2022 antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan senilai 98,53. Kepadatan penduduk di Kabupaten Ngawi Tahun 2022 mencapai 629 jiwa/km².

2.1.3 Kondisi Kesehatan Kabupaten Ngawi

Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM). Indikator ini memiliki cakupan indikator komposit yang dapat menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan, yakni dengan melihat jumlah Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Ngawi. Kondisi *stunting* pada dasarnya dapat terdeteksi apabila pertumbuhan tinggi balita kurang dari kesesuaian terhadap umur mereka dan akan mengakibatkan pertumbuhan yang gagal akibat faktor-faktor di atas. Berdasarkan kondisi di atas, dilakukan pendataan terkait grafik tren Ibu Hamil KEK dan kasus balita gizi buruk tersebut dari tahun 2018-2022 (Bappeda Kabupaten Ngawi, 2024).

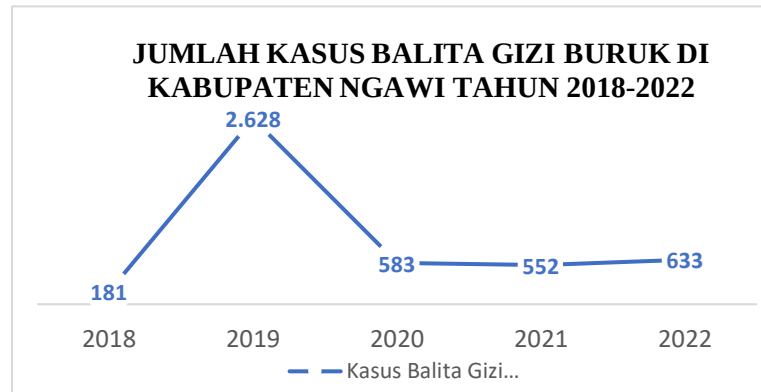
Gambar 2. 2 Grafik Kasus Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) di Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Ngawi dalam Angka 2023

Melalui grafik di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus Ibu Hamil KEK menunjukkan tren yang fluktuatif, namun memiliki kecenderungan meningkat yang tentu akan menimbulkan dampak risiko bayi lahir prematur, terhambatnya perkembangan otak janin dan bayi berisiko *stunting*.

Gambar 2. 3 Grafik Tren Kasus Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Ngawi dalam Angka 2023

Berdasarkan ilustrasi di atas, pada tahun 2022 terdapat 633 kasus balita yang menderita gizi buruk. Upaya penanggulangan gizi buruk mencakup kesiapan dari ekonomi keluarga, kematangan usia pernikahan orang tua, pemberian bantuan makanan tambahan dari pemerintah, dan pemantauan grafik tumbuh balita oleh kader.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi

2.2.1 Visi dan Misi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan kegiatannya, selaras dengan visi Kabupaten Ngawi, DP3AKB memiliki visi, yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlak, Makmur dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dengan Semangat Gotong Royong dalam Bingkai NKRI. Adapun misi dari DP3AKB Kabupaten Ngawi, yakni:

1. Melaksanakan peningkatan terhadap SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat;
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima;
4. Melaksanakan peningkatan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan; dan
5. Melaksanakan pengembangan budaya lokal dengan berlandaskan keagamaan dan gotong royong.

2.2.2 Tugas dan Fungsi

DP3AKB mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, DP3AKB menyelenggarakan fungsi:

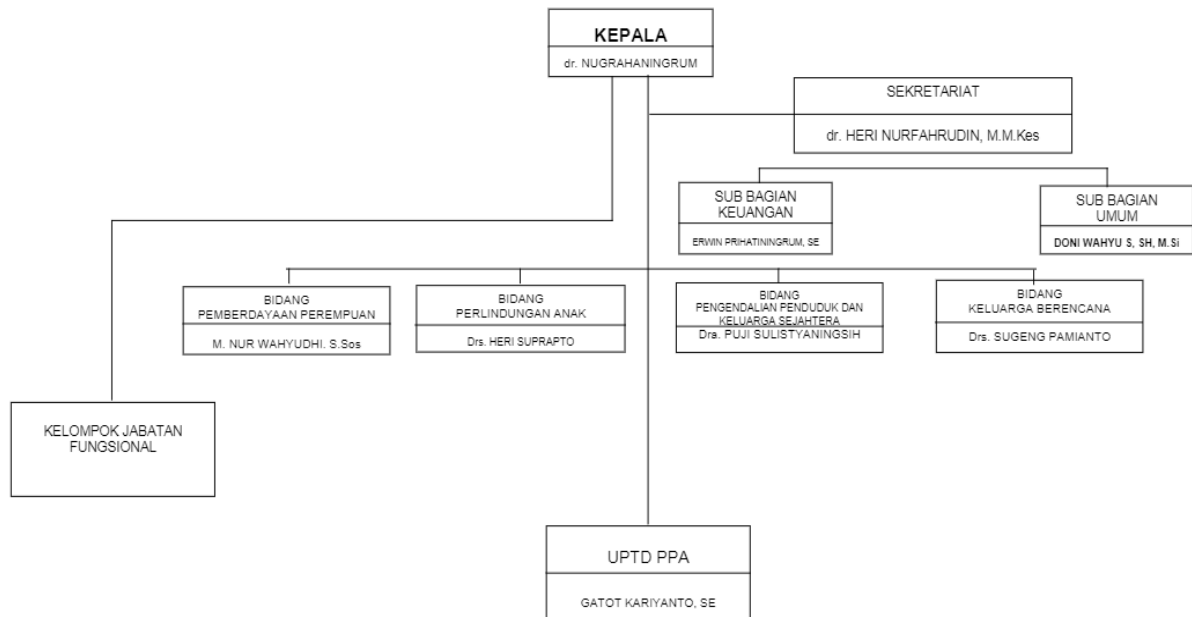
1. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada DP3AKB;
2. Penetapan kebijakan teknis, strategis dan keterpaduan dalam rangka peningkatan kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;

3. Penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka peningkatan kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur (PUS), peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
4. Penyelenggaraan penyuluhan dan penyebaran informasi dalam rangka peningkatan kepesertaan Keluarga Berencana bagi PUS, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak; dan
5. Penyelenggaraan pembinaan teknis fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

2.2.3 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

**Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi**



Sumber: DP3AKB Kabupaten Ngawi, 2024

2.2.4 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Bidang keluarga berencana merupakan salah satu bidang yang berada pada DP3AKB Kabupaten Ngawi. Bidang ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan peran Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam kegiatan pengendalian penduduk;
2. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan laju pertumbuhan penduduk; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.5 *Technical Assistant* Satuan Tugas (Satgas) *Stunting* DP3AKB Kabupaten Ngawi

Technical Assistant Satuan Tugas (Satgas) *Stunting* DP3AKB Kabupaten Ngawi berdiri di bawah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera dengan lingkup tugas dan tanggungjawab yang meliputi:

1. bertanggung jawab kepada koordinator *program manager*;
2. melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dengan koordinator *program manager*, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan;
3. menyusun rencana kerja satgas *stunting* sehubungan dengan pelaksanaan tugas satgas *stunting* di wilayah kerjanya bersama;
4. memimpin dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi konsultasi, fasilitasi dalam koordinasi, penyediaan dan pengelolaan data *stunting* di tingkat kabupaten/kota, serta pelaksanaan audit kasus *stunting* di wilayah kerjanya;
5. mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan satgas *stunting* di kabupaten/kota yang menjadi tanggung jawabnya; dan
6. mengendalikan dan memastikan penyelesaian tugas-tugas penurunan *stunting* dan menghasilkan rekomendasi kebijakan.

2.3 Gambaran Umum Kelurahan Margomulyo

2.3.1 Visi dan Misi Kelurahan Margomulyo

1. Kelurahan Margomulyo dalam menjalankan kegiatannya memiliki visi, yakni ”Terwujudnya Masyarakat Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi yang Mandiri, meningkatkan SDM yang berkualitas dan budaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat;

2. mengembangkan perekonomian kerakyatan masyarakat Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi melalui kemudahan investasi dan dengan berbasis potensi lokal; dan
3. meningkatkan kondusivitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong royong.

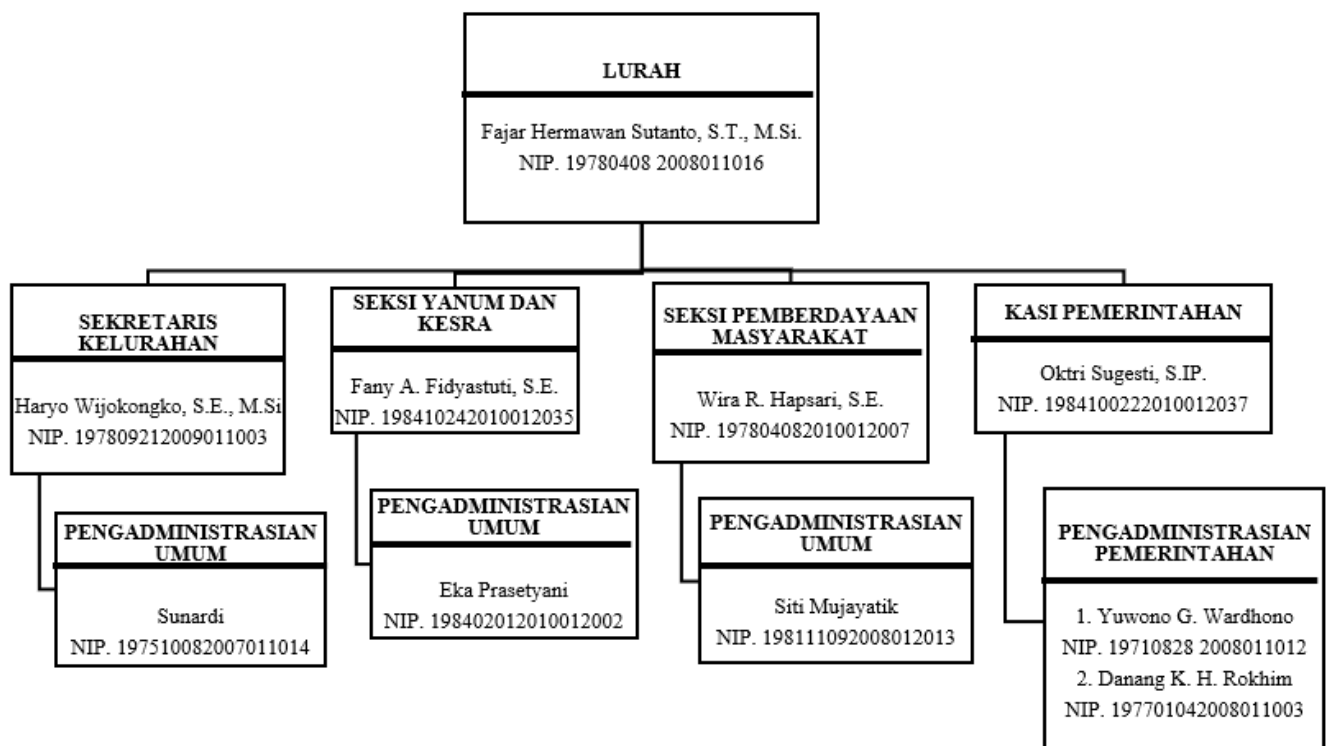
Berakhlak, Makmur dan Berdaya Saing dengan Semangat Gotong Royong”.

Adapun misi yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Kelurahan Margomulyo adalah :

2.3.2 Struktur Organisasi

Kelurahan Margomulyo memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 5
Struktur Organisasi Kelurahan Margomulyo



Sumber: Kelurahan Margomulyo, 2024

2.3.3 Kondisi Geografis dan Demografis Kelurahan Margomulyo

Kelurahan Margomulyo merupakan salah satu dari empat kelurahan yang ada di Kecamatan Ngawi. Kelurahan ini terletak di dekat pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Ngawi. Dari Kecamatan Ngawi, jarak Kelurahan Margomulyo sekitar 500 m dan memiliki jarak 1,3 km dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Kelurahan Margomulyo berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah berikut:

- a) Sebelah Utara: Kelurahan Karangtengah;
- b) Sebelah Barat: Desa Beran;
- c) Sebelah Timur: Desa Banyu Urip; dan
- d) Sebelah Selatan: Tugu Kartonyono Ngawi.

Kelurahan Margomulyo terbagi menjadi 4 dusun dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai pegawai pemerintahan dan pedagang. Memiliki luas sebesar 2,16 km², jumlah penduduk di Kelurahan Margomulyo mencapai 7.0033 jiwa dengan kepadatan penduduk 3.256 jiwa/km².

2.3.4 *Stunting*

Stunting merupakan peristiwa dimana pertumbuhan pada anak dinilai dalam kondisi yang gagal. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi yang kronis dan berkelanjutan. Kondisi gagal tumbuh tersebut lumrah terjadi pada periode kehidupan di 1.000 hari pertama dimana terhitung sejak kehamilan ibu hingga anak berusia dua tahun. Tidak hanya berdampak pada fisik anak yang terlihat pendek dan kurus, *stunting* juga akan mengakibatkan perkembangan kognitif

seorang anak akan mengalami hambatan yang dapat mengganggu keberjalanan produktivitas, masa pembelajaran, dan kesejahteraan anak hingga dewasa nanti.

Beragam upaya yang telah dilakukan pemerintah di antara lain ialah menjalankan koordinasi antar lembaga dimana melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Untuk itu, disusun pedoman utama yang salah satu di antaranya memiliki fokus untuk mengatasi penyebab *stunting* dari sektor yang berada di luar sektor kesehatan dan memiliki korelasi dengan kebijakan pangan, program edukasi, pelaksanaan pola asuh, dan penyediaan kebersihan yang layak bagi masyarakat.

Untuk kasus *stunting* di Kabupaten Ngawi, penanganannya melibatkan program dari pemerintah setempat, yakni mencakup kampanye penyuluhan gizi kepada masyarakat, program pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang teridentifikasi mengalami *stunting*, serta upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap gizi yang seimbang dan berkualitas. Mengenai Kelurahan Margomulyo, langkah-langkah spesifik untuk mengatasi *stunting* di Kelurahan Margomulyo mencakup penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan gizi bagi ibu hamil dan menyusui, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri juga penting untuk mengatasi masalah *stunting* ini secara efektif.